

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota merupakan ruang terbatas yang sarat akan nilai-nilai yang berpengaruh bagi kehidupan para penghuninya (Irianto, 2012). Ruang kota dikonstruksi sedemikian rupa oleh para aktor (warga) kota melalui pemaknaan mereka tentang kota sehingga mempengaruhi tindakan sosialnya berdasarkan pemaknaan tersebut (Tenri & Asrina, 2015). Secara kultur, kehidupan kota kerap kali dipandang lebih beradab dan berbudaya lantaran proses pembangunannya yang berkembang pesat (Irianto, 2012).. Hal ini kemudian mempengaruhi karakteristik masyarakat kota yang cenderung terkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat material dan rasional sehingga menuntut individu untuk bertindak dan berperilaku sebagai anggota masyarakat yang berorientasi pada *goal* dan *achievement*. Oleh karena itu, gaya hidup masyarakat kota cenderung lebih mengedepankan tampilan dan kualitas fisik sehingga tampak *civilized* (Nasution, 2016).

Lefebvre (Dalam Aminah, 2016) mengemukakan bahwa perkembangan kota dunia pada abad ke-21 mencirikan karakter kota kapitalis. Hal ini tampak melalui maraknya pembangunan gedung, fasilitas umum, ruang publik, dan sebagainya oleh investor di wilayah perkotaan sebagai bentuk investasi dan respon terhadap tuntutan ekonomi global (Aminah, 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang-ruang kota yang terbatas telah dijadikan sebagai komoditas karena diperebutkan dan dikuasai oleh kekuatan kapitalis. Terdapat problem mendasar terkait dengan pembagian ruang secara fisik manakala ruang kota dijadikan sebagai komoditas. Dalam hukum komoditas, pihak yang memiliki kekuatan modal lebih besar dan lebih baik akan menjadi pihak yang menguasai ruang tersebut (Basundoro, 2018). Layaknya sebuah kompetisi, selalu terdapat pihak yang kalah dalam proses perebutan ruang di kehidupan kota. Mereka adalah

kelompok masyarakat miskin kota yang tersisih dari kehidupan wajar dan tidak memperoleh ruang yang layak di kehidupan perkotaan (Basundoro, 2018).

Eksistensi masyarakat miskin di wilayah perkotaan menjadi semacam paradoks bagi kehidupan kota. Di satu sisi, kota dipandang sebagai sumber peradaban yang melahirkan imajinasi-imajinasi tentang keberhasilan. Namun di sisi lain, persaingan bebas yang terjadi di kehidupan kota melahirkan sejumlah kelompok yang dianggap kurang beradab, atau dengan kata lain orang-orang yang dianggap kalah (Basundoro, 2018). Kekalahan ini nampak dari ketidakberdayaan mereka dalam mengakses ruang hidup yang layak di perkotaan dan semakin diperjelas dengan kebijakan-kebijakan penataan ruang kota yang seringkali mengusur ruang kehidupan masyarakat miskin demi kepentingan proyek pembangunan yang sangat kapitalis. Fenomena ini menunjukkan bahwa terjadi keberpihakan diantara regulator (pemerintah) pada keberlangsungan kapitalisme industrial. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Lefebvre bahwa *“ruang adalah produk politik dan instrumen bagi perubahan sosial ekonomi sehingga ruang itu tidak netral dan pasif”* (Aminah, 2016).

Berbagai studi mengenai masyarakat miskin kota menyimpulkan bahwa mereka selalu kalah oleh kekuatan dominan. Namun disaat yang bersamaan, masyarakat miskin selalu melakukan upaya bertahan dan melawan secara terus-menerus dalam rangka memperoleh ruang untuk hidup. Perlawanan masyarakat miskin kota diwujudkan dengan cara yang beragam melalui fenomena kontestasi, negosiasi, konsensus, dan konflik di perkotaan (Aminah, 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa diantara gempuran kelas-kelas dominan, masyarakat miskin kota membuktikan bahwa mereka juga mampu menjadi kekuatan dominan yang turut menandai dinamika perkotaan (Basundoro, 2018). Oleh karena itu, dalam konteks ini pemerintah, masyarakat, dan pasar menjadi aktor-aktor yang seringkali terlibat dalam proses perebutan ruang.

Salah satu kota di Indonesia yang seringkali menjadi lokasi perebutan ruang yang masif adalah Kota Surabaya. Sejak abad ke-19, kota ini telah menjadi

tujuan utama bagi para pendatang Belanda yang hendak menjalankan misi ekonomi. Sejak itu pula pertumbuhan penduduk di Surabaya meningkat tajam (Basundoro, 2009). Sejalan dengan hal tersebut, McGee (Dalam Firmansyah, 2017), seorang pakar perkotaan dari University of British Colombia menyebutkan bahwa Kota Surabaya merupakan kawasan megaurban yang menarik bagi kaum migran karena arus industrialisasinya yang berkembang pesat. Keadaan ini menyebabkan tingginya angka pertumbuhan penduduk di Surabaya atau yang biasa disebut sebagai *over urbanization* sehingga persaingan ekonomi semakin tinggi (Nasution, 2016). Ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja di sektor formal dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia menyebabkan sektor formal tidak mampu menampung keseluruhan tenaga kerja sehingga melahirkan sejumlah lapangan pekerjaan di sektor informal yang menandai dinamika sosial di kehidupan perkotaan. Beragam bentuk ekonomi informal di wilayah perkotaan umumnya meliputi pedagang asongan, pemulung, pedagang kaki lima, dan sebagainya (Nasution, 2016).

Kemunculan berbagai sektor informal dalam sistem ekonomi perkotaan mengindikasikan ketidakmampuan kota dalam menghadapi ledakan jumlah penduduk. Kota sebagai ruang yang terbatas sejatinya tidak dirancang untuk menerima pendatang dalam skala yang besar. Konsekuensinya adalah terjadi ketegangan diantara sejumlah kelompok kepentingan dalam proses penggunaan ruang kota secara terus-menerus karena tingginya permintaan atas ruang, baik oleh individu maupun kelompok tertentu (Basundoro, 2018). Oleh karena itu, konflik-konflik terkait penggunaan ruang di wilayah perkotaan seringkali terjadi. Apabila diibaratkan sebagai sebuah perlombaan, sejumlah kelompok kepentingan yang terlibat dalam kontestasi ruang saling mencari strategi yang tepat untuk bisa menjadi pemenang. Pihak yang menjadi pemenang dalam kompetisi perebutan ruang akan mendapatkan dan menguasai ruang itu sendiri, sedangkan pihak yang kalah harus menyesuaikan diri dengan keadaan dalam rangka menemukan ruang baru untuk mereka (Basundoro, 2018).

Di Surabaya, persoalan perebutan ruang yang melibatkan sejumlah kelompok kepentingan dapat dijumpai di Pasar Tugu Pahlawan Pagi (disingkat TP Pagi). Pasar TP Pagi merupakan pasar tumpah yang berlokasi di sekitar jalan Pahlawan Surabaya. Kehadiran Pasar TP Pagi yang beroperasi di tengah-tengah kota menyimpan sejumlah potensi konflik perebutan ruang yang melibatkan berbagai unsur yang menginginkan atau berkepentingan dalam penggunaan ruang tersebut. Dalam konteks ini, konflik perebutan ruang terjadi karena adanya benturan konstruksi atas fungsi ruang publik trotoar di sekitar Jalan Pahlawan Surabaya yang melibatkan pemerintah kota, pedagang kaki lima, dan pejalan kaki.

Bagi pemerintah, trotoar merupakan ruang publik yang dirancang untuk berbagai kepentingan individu penggunaanya, bukan milik komunitas tertentu (Kumoro, 2013). Keberadaan para pedagang kaki lima yang tidak teratur dan tidak tertata di sekitar trotoar Jalan Pahlawan tentu bertentangan dengan konsep idealisme tata ruang kota yang dipersepsikan para perancang kota sehingga menimbulkan kesan kumuh, kotor, dan tidak tertib (Nasution, 2016). Bagi pemerintah, kondisi demikian membuat *landmark* kota Surabaya terkesan kumuh dan tidak mencerminkan citra ibukota provinsi Jawa Timur (Indrawan, 2015). Terlebih lagi, kawasan sekitar Jalan Pahlawan merupakan kawasan yang peruntukannya didominasi oleh sektor formal yang dibuktikan dengan keberadaan bangunan-bangunan formal berupa monumen, kantor pos, bank, tempat peribadatan, stasiun, sekolah, kantor gubernur, dan bangunan formal lainnya. Sehingga kehadiran pedagang kaki lima di area tersebut terkesan sangat kontras.

Kegiatan sosial yang tampak di kawasan Jalan Pahlawan tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai historisnya. Secara historis, wilayah sekitar Jalan Pahlawan merupakan kawasan *Old Central Business District Surabaya* yang identik sebagai pusat perdagangan yang menopang kehidupan Kota Surabaya zaman dulu (Indrawan, 2015). Wilayahnya yang terletak di sisi selatan Jembatan Merah merupakan tempat yang strategis bagi orang-orang Belanda membangun pusat pemukiman, perkantoran dan perdagangan (Basundoro, 2009). Sejak masa kolonial, kawasan ini telah difungsikan untuk kegiatan formal sehingga saat ini di

kawasan sekitar Jembatan Merah menuju ke selatan—khususnya di sekitar Jalan Pahlawan—banyak dijumpai bangunan-bangunan formal yang memiliki kedudukan sentral bagi Kota Surabaya.

Di lain pihak, masyarakat kota memiliki pandangan lain terkait jalanan. Posisi jalan Pahlawan yang terletak di pusat kota dianggap sebagai lokasi yang strategis untuk menjalankan kegiatan berdagang. Terlebih lagi lokasi ini berdekatan dengan sektor-sektor formal dan tempat wisata Tugu Pahlawan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Mc.Gee dan Yeung (Dalam Mujiarjo, 2011) bahwa wilayah operasi pedagang kaki lima selalu menyasar pada lokasi yang menjadi pusat konsentrasi manusia seperti pusat perbelanjaan, perkantoran swasta atau pemerintah, dan tempat wisata. Oleh karena itu, ketika akhir pekan, kawasan sekitar Jalan Pahlawan nyaris selalu dipenuhi pedagang kaki lima yang menjual berbagai macam barang, layaknya sebuah pasar. Sehingga lokasi ini sering disebut sebagai Pasar TP Pagi. Sebagian besar pedagang yang berjualan di Pasar TP Pagi didominasi oleh pedagang pakaian, terutama pakaian bekas atau *second*. Namun adapula pedagang yang menjual aneka makanan-minuman, perabotan rumah tangga, mainan anak-anak, aksesoris, dan lain-lainnya.

Kehadiran pedagang kaki lima yang memenuhi ruas Jalan Pahlawan sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Awalnya, para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pasar Tugu Pahlawan Pagi ini hanya beroperasi di sekitar area museum Tugu Pahlawan. Namun karena jumlah pedagang yang berjualan semakin membludak, lokasi tersebut tidak mampu lagi untuk menampung pedagang kaki lima secara keseluruhan. Sehingga lokasi berdagang mulai meluber hingga ke sisi luar Tugu Pahlawan, mulai dari Jalan Bubutan, Jalan Kebon Rojo, Jalan Pahlawan, Jalan Sulung, dan Jalan Semut Madya Indah.

Fenomena yang terjadi di Pasar TP Pagi tersebut menunjukkan bahwa ketika tidak ada lagi ruang yang cukup terbuka untuk berdagang, jalanan dipandang sebagai wilayah kosong dan tak bertuan yang dapat diduduki dan

dikuasai (*frontier*). Melbin (Dalam Riomandha, 2000) menyebutkan bahwa konsep *frontier* muncul apabila sebuah daerah yang tampak sangat padat dianggap sebagai area kosong yang harus dikuasai. Hasrat untuk menduduki dan menguasai ruang kosong inilah yang membangun ideologi *frontierisme* (Kumoro, 2013). *Frontierisme* merupakan sebuah konstruksi terhadap ruang yang memunculkan tindakan yang bersifat progresif dan ekspansif untuk menguasai, menaklukkan, bahkan menembus batas-batas suatu ruang. Dalam proses ekspansi ini, pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menguasai daerah *frontier* saling berkompetisi dan bersiasat agar memenangkan pertempuran terkait ruang yang ingin dikuasai (Riomandha, 2000). Bahkan bukan tidak mungkin jika kompetisi ini berpotensi memunculkan konflik yang bersifat simbolik. Konflik simbolik inilah yang terjadi di Pasar TP Pagi, dimana pihak yang berkontestasi dalam penguasaan ruang meliputi pedagang kaki lima, pemerintah kota, dan pejalan kaki.

Di wilayah *frontier*, aturan-aturan yang bersifat formal cenderung dikesampingkan sehingga interaksi yang terjadi justru menunjukkan kesemrawutan. (Kumoro, 2013). Kesemrawutan dan ketidakteraturan ini adalah gambaran Pasar TP Pagi yang menjadi sorotan Pemerintah Kota Surabaya. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah kota untuk mengendalikan praktik-praktik meruang dari pedagang kaki lima yang memenuhi kawasan sekitar Jalan Pahlawan, termasuk melalui upaya penertiban. Namun upaya penertiban ini seringkali dinilai tidak efektif karena pedagang kaki lima selalu kembali berjualan di lokasi semula. Pada akhirnya Pasar TP Pagi menjadi ruang yang tidak pernah selesai diperebutkan dan menyimpan sejumlah potensi konflik perebutan ruang.

Dalam proses perebutan ruang, selalu terdapat pihak yang ditaklukkan. Hal ini sejalan dengan penelitian berjudul “Produksi Ruang Sosial Pedagang Kaki Lima di Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar” yang ditulis oleh Ni Nyoman Tirta Yamuna, dkk. (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguasaan atas ruang di Lapangan Niti Mandala Renon didominasi oleh para pedagang kaki lima. Berdasarkan pendapat pengunjung, suasana Lapangan Niti Mandala Renon

tampak lebih hidup dengan kehadiran para PKL. Bahkan pembentukan ruang-ruang baru yang dilakukan para pedagang kaki lima ini berhasil mengalahkan kekuasaan pemerintah atas ruang tersebut. Menurut penulis, produksi ruang sosial yang terbentuk diantara pedagang kaki lima di Lapangan Niti Mandala Renon terjadi melalui proses bersosialisasi, interaksi, hingga terbentuknya zona ruang (Yamuna, Punia, & Mahadewi, 2019).

Lain halnya dengan penelitian berjudul “Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya” yang ditulis oleh Siti Aminah (2016). Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelas dominan yang meliputi regulator dan investor memiliki kekuatan lebih besar dalam penguasaan suatu ruang. Aminah menjelaskan bahwa penataan ruang perkotaan cenderung menunjukkan keberpihakan pemerintah pada kekuatan kapitalis. Hal ini diperkuat melalui kebijakan-kebijakan tata ruang kota yang cenderung mendukung keberlangsungan kapitalisme. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar ruang kota dikuasai oleh kekuatan dominan dan menyingkirkan masyarakat marjinal dari kehidupan yang layak di perkotaan. Oleh karena itu, persoalan perebutan ruang seringkali memicu konflik yang melibatkan aktor pemerintah, masyarakat, dan kekuatan kapitalis/investor (Aminah, 2016).

Sehubungan dengan penelitian diatas, Ali Minanto (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Kota, Ruang, Dan Politik Keseharian: Produksi dan Konsumsi Ruang Bersenang-senang dalam Geliat Yogyakarta” pun mengungkapkan bahwa kota merupakan ruang yang diproduksi sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan konsumerisme yang tinggi diantara warga kota. Namun demikian, ada kelas-kelas tertentu di perkotaan yang tidak memiliki modalitas ekonomi yang cukup untuk menjadi konsumen aktif, yaitu kelas menengah kebawah dan masyarakat miskin. Oleh karena itu, masyarakat golongan kelas tersebut berusaha untuk mensiasati keadaan dengan membentuk ruang-ruang alternatif untuk menciptakan kesenangan sesuai dengan kemampuannya (Minanto, 2018).

Pembentukan ruang sementara yang bertujuan untuk menciptakan kesenangan juga tampak dalam penelitian Gregorius Sri Wuryanto (2016) yang berjudul “Membaca Kota Sebagai Heterotopia: Praktik-Praktik Seni Di Ruang Publik Dan Apropriasi Kota Sebagai Ruang Kreatif”, dimana ruang kota yang bersifat formal diappropriasi menjadi arena kreatif sebagai upaya untuk menciptakan ekulibrium. Ketidakselarasan antara praktik spasial dengan konsep ruang yang tersedia cenderung memunculkan konflik-konflik spasial. Oleh karena itu dibentuklah negosiasi sebagai upaya untuk mengappropriasi ruang menjadi arena kreatif. Pembentukan ruang sebagai arena kreatif ini merupakan praktik-praktik seni yang menyajikan persepsi kreatif dalam menanggapi bentukan-bentukan formal ruang kota. Persepsi kreatif inilah yang menghadirkan lapisan-lapisan ruang liyan yang menjadikan kota sebagai sebuah heterotopia (Wuryanto, 2016).

Dalam penelitian berjudul “Frontierisme Pemanfaatan Ruang Publik Sebagai Arena Kreatif Di Kota Surakarta” yang ditulis oleh Nugrahani (2017) tentang pemanfaatan ruang publik berupa pasar tradisional menjadi arena kreatif yang tidak terkait langsung dengan aktivitas jual-beli, menunjukkan bahwa terdapat kejenuhan yang dirasakan oleh seniman, komunitas kreatif, lembaga swadaya, hingga organisasi kemasyarakatan dalam memanfaatkan ruang publik seperti galeri seni, gedung pertunjukan, dan pusat perbelanjaan sebagai ruang bersama. Pihak-pihak tersebut beranggapan bahwa ruang publik tersebut sudah terlalu mainstream untuk ditempati sehingga mereka memanfaatkan pasar tradisional Pucangsawit dan Pasar Kembang sebagai ruang bersama yang mereka sebut sebagai “arena kreatif” (Nugrahani, 2017).

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagaimana diatas, dapat ditarik benang merah bahwa ruang sosial diproduksi melalui serangkaian gagasan, persepsi, dan pengalaman sehari-hari individu yang beraktivitas dalam ruang yang sama. Namun kadangkala masing-masing pihak yang menggunakan suatu ruang seringkali memandang ruang secara berbeda sesuai pengetahuan budaya mereka. Benturan makna atas ruang ini memungkinkan individu-individu tersebut terlibat

konflik perebutan ruang, sehingga munculah siasat, negosiasi, dan kompromi sebagai upaya mempertahankan ruang sesuai kepentingan dan kebutuhannya masing-masing.

Apabila dikaitkan dengan kasus Pasar TP Pagi, fenomena perebutan ruang juga terjadi di Pasar TP Pagi, dimana hal ini ditunjukkan melalui persoalan okupasi pedagang kaki lima di trotoar sekitar Jalan Pahlawan yang tidak kunjung usai. Persoalan ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan antara bagaimana ruang seharusnya diwujudkan dengan ruang nyata yang “hidup” berdasarkan pengalaman sehari-hari penggunaannya. Berdasarkan Perda, trotoar yang digunakan sebagai area Pasar TP Pagi seharusnya adalah ruang bagi pejalan kaki, bukan diperuntukkan sebagai tempat berdagang. Tindakan okupasi pedagang kaki lima ini tentu bersifat ilegal dan melanggar Perda. Namun menariknya, pasar ini jarang sekali mendapat penertiban yang bersifat ekstrem, dalam artian digusur secara paksa sebagaimana kebanyakan pasar ilegal lainnya. Sejauh ini, penertiban di Pasar TP Pagi hanya berupa pembatasan jam operasional pedagang kaki lima hingga batas waktu tertentu. Bahkan Pasar TP Pagi masih dapat mempertahankan eksistensinya hingga sekarang.

Menarik untuk mengetahui upaya bertahan dan negosiasi-negosiasi yang dilakukan pedagang kaki lima untuk mempertahankan usahanya di Pasar TP Pagi, khususnya apabila melihat posisinya sebagai kelompok subordinat yang berhadapan dengan kelompok dominan (pemerintah kota). Selain itu, penting juga untuk mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah kota dalam mengendalikan praktik meruang pedagang kaki lima sebagai upaya mempertahankan gagasan mereka atas ruang di Pasar TP Pagi. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tentang bagaimana konstruksi ruang yang terbentuk diantara pihak-pihak yang berinteraksi di Pasar TP Pagi sehingga memunculkan hasrat untuk menguasai ruang. Serta bagaimana siasat dan strategi yang dilakukan pengguna ruang untuk mempertahankan ruang sesuai kebutuhan dan kepentingannya. Proses inilah yang disebut sebagai mekanisme politik keseharian (*everyday politics*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana konstruksi ruang yang terbentuk diantara pihak-pihak yang berinteraksi di Pasar TP Pagi sehingga memunculkan hasrat untuk menguasai ruang Pasar TP Pagi?
- 2) Bagaimana bentuk strategi dan siasat yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam penguasaan ruang dalam rangka mempertahankan kepentingannya atas ruang Pasar TP Pagi?

Untuk mengkaji permasalahan penelitian secara lebih mendalam, rumusan masalah diatas di spesifikasikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep ruang Pasar TP Pagi menurut pedagang kaki lima, Satpol PP, dan pejalan kaki atau pengunjung?
2. Bagaimana benturan makna atas ruang yang muncul diantara pihak-pihak yang berinteraksi di Pasar TP Pagi?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah kota untuk mengendalikan praktik meruang pedagang kaki lima di Pasar TP Pagi?
4. Bagaimana bentuk negosiasi dan siasat yang dilakukan pedagang kaki lima untuk bertahan di Pasar TP Pagi?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *everyday politics* atau politik keseharian yang tercermin dalam aktivitas para aktor yang terlibat dalam penguasaan ruang di Pasar TP Pagi Surabaya sebagai upaya mempertahankan kepentingannya.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Mengetahui konstruksi ruang yang terbentuk diantara pihak-pihak yang berinteraksi di Pasar TP Pagi sehingga memunculkan hasrat untuk menguasai ruang Pasar TP Pagi.
- 2) Mengetahui bentuk siasat dan strategi yang dilakukan pengguna ruang yang berkontestasi di Pasar TP Pagi sebagai upaya mempertahankan kepentingannya atas ruang.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam mengkaji fenomena sosial yang berkaitan dengan ruang dalam konteks masyarakat perkotaan. Serta hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian serupa di waktu yang akan datang. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah mendeskripsikan gagasan, persepsi, dan pengalaman aktor yang terlibat dalam penguasaan ruang di area Pasar TP Pagi sehingga memunculkan siasat dan strategi untuk mempertahankan ruang sesuai kebutuhan masing-masing pengguna ruang. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam memahami dinamika sosial di lingkungan perkotaan, khususnya terkait persoalan okupasi pedagang kaki lima di ruang-ruang publik dan dimanfaatkan secara bijak sebagaimana mestinya.

1.5 Landasan Teori

Kajian mengenai ruang perkotaan selalu berkaitan dengan logika berpikir modernism yang menitikberatkan pada rasio. Para pemikir modernism berpandangan bahwa ruang perkotaan yang berorientasi pada *goal* dan *achievement* merupakan produk dari idealisme mereka yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (Setiawan, 2017). Namun ternyata rasionalitas tidak dapat mencakup atau menjelaskan semua realitas yang ada. Dengan mengembalikan segala kebenaran ke dalam rasio, maka realitas akan kehilangan segi misterinya, segi magis-religius-spiritualnya dan alam hanya akan

dilihat sebagai obyek yang dapat dikuasai (Budiono, *Personal Communication*, April 22, 2020). Situasi inilah yang terjadi dalam lingkup ruang perkotaan. Ruang perkotaan mengalami berbagai situasi yang tidak sesuai dengan harapan para pemikir modernisme (Setiawan, 2017).

Menurut Heidegger, kegagalan modernisme dalam membedakan realitas sebagaimana yang dipikirkan dengan realitas sebagaimana adanya memicu berbagai kritik dari kalangan pemikir Neo-Marxis (Budiono, *Personal Communication*, April 22, 2020). Salah satunya Henri Lefebvre, seorang filsuf Marxis kelahiran Perancis yang cukup berpengaruh berkat karyanya yang fenomenal yaitu *The Production of Space* (1991) (Fatmawati, 2019). Sebagian besar pemikirannya mengkritik ideologi Modernisme yang dianut oleh para Marxist klasik mengenai masalah spasialitas kota (Setiawan, 2017).

Dalam mengkaji permasalahan ruang kota, Lefebvre mengkritik logika berpikir saintifik (eksak). Menurut Lefebvre logika saintifik memang penting, namun dalam ilmu sosial hal tersebut kurang relevan. Hal ini karena logika saintifik menempatkan rasionalitas sebagai pusat seluruh realitas sehingga rasio dianggap bisa menjelaskan segalanya., padahal realitas selalu bersifat multidimensi. Rasio manusia hanya mampu menangkap salah satu saja dari dimensi realitas itu. Oleh karena itu, Lefebvre menunjukkan bahwa realitas sosial tidak dapat hanya dilihat dan dipahami dari struktur yang bekerja (makro), tetapi justru pada aspek mikro yang menyangkut interaksi sosial, lingkup sosial, dan kurun yang sebuah interaksi (Putra, *Personal Communication*, April 28, 2020).

Ketika menyoroti permasalahan ruang perkotaan, Lefebvre mempertemukan konsep ruang berdasarkan aliran filsafat Descartes dan Kant. Bagi Descartes, ruang didefinisikan secara obyektif berdasarkan geometri. Oleh karena itu konsep ruang Descartes disebut sebagai ruang konkret. Sedangkan menurut Immanuel Kant, ruang didefinisikan sebagai pengalaman subyektif manusia atas ruang. Apabila mata dan tangan merasakan keberadaan ruang, namun pikiran tidak berada dalam konsep ruangan, maka sejatinya ruangan

tersebut tidak eksis. Oleh karena itu, konsep ruang Kant disebut sebagai ruang abstrak (Setiawan, 2017). Menurut Lefebvre, gagasan Kant dipakai oleh para perancang kota yang merasakan ruang secara abstrak, sedangkan gagasan Descartes dirasakan oleh masyarakat yang merasakan ruang konkret. Kedua gagasan inilah yang mendasari munculnya konsep ruang sosial (Setiawan, 2017).

Menurut Lefebvre konsep ruang sosial berbanding terbalik dengan konsep ruang swadiri, yaitu sebagai realitas independen yang ada “dalam dirinya sendiri” (*in its self*). Bagi Lefebvre ruang tidak ada “dalam dirinya sendiri” karena konsep tersebut tidak pernah mampu menemukan posisi awal epistemologisnya. Dengan kata lain, ruang “ada” bukan semata-mata karena kehadirannya dapat dirasakan secara fisik (sebagai sebuah “benda”) dan hampa nilai, melainkan ruang “ada” karena dihidupi oleh berbagai realitas sosial masyarakatnya. Dalam suatu ruang terjadi proses tarik-menarik kepentingan antar berbagai kekuatan yang menghuni “ruang material” (fisik) yang sebenarnya telah “ada”. Oleh karena itu, menurutnya ruang “ada” karena selalu diproduksi dan direproduksi oleh keadaan sosial (Setiawan, 2017).

Ruang dibentuk dari material yang bersifat konkret dan kemudian dikonseptualisasikan sedemikian rupa oleh para perancangannya. Namun pada saat yang bersamaan, terlepas dari segala konseptualisasi dan saintifikasi mengenai ruang, ruang berisi pengalaman-pengalaman hidup manusia yang aktif (Robet, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa ruang merupakan produk (sosial) yang selalu berkaitan dengan realitas sosial. Dengan demikian, ruang merupakan sesuatu yang dinamis bukan sesuatu yang tetap (ajeg) (Putra, *Personal Communication*, April 28, 2020).

Pemahaman tentang ruang oleh Lefebvre secara fenomenologi tercermin melalui tiga konsep atas keruangan yang disebut sebagai “*a conceptual triad of social space production*”. Triadik konsep tersebut meliputi praktik spasial (*spacial practice*), representasi ruang (*representation of space*), dan ruang representasi (*space of representation/ representational space*) (Beveridge &

Koch, 2019). Praktik spasial (*spacial practice*) yang berada di ranah *perceived space* merupakan kehadiran ruang yang dirasakan secara fisik karena adanya interaksi antara manusia dengan material-material yang bersifat indrawi secara konstan dalam konteks ruang dan waktu sehingga memunculkan praktik-praktik sosial yang bersifat khas diatas ruang tersebut.

Representasi ruang (*representation of space*) yang berada di ranah *conceived space* meliputi bagaimana ruang dipahami secara konsep oleh para perancangannya. Dalam konteks ini, ruang dideskripsikan sebagai sesuatu yang abstrak dan imajinatif sesuai dengan pengetahuan, kode, dan tanda dari para ahli yang memaknai suatu ruang. Konseptualisasi ruang yang dilakukan oleh para perancangannya ini merupakan gambaran ideal atas ruang untuk digunakan sebagaimana seharusnya.

Ruang representasi (*representational space*) melihat bagaimana ruang terdiri dari pengalaman-pengalaman hidup manusia yang berada di dalam suatu ruang (*lived space*). Pengalaman sehari-hari ini merupakan realitas “sebagaimana adanya” yang seringkali tidak dapat dijelaskan secara teoritis. Melalui pemahamannya terhadap *lived space* inilah Lefebvre mengkritik logika strukturalisme yang menitikberatkan pada struktur yang berlaku secara universal (makro). Menurutny realitas sosial tidak dapat dipahami melalui algoritma struktur yang bekerja secara universal, melainkan juga harus melihat partikel-partikel yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari (mikro) karena produksi ruang selalu hadir dan dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari (*everyday life*). Oleh karena itu, Lefebvre menegaskan bahwa realitas sosial yang terdiri atas pengalaman hidup sehari-hari tidak dapat diselesaikan melalui analisis teoritis.

Hal ini tampak dari berbagai analisis teoritis yang terkandung dalam *conceived space* selalu meninggalkan residu yang berharga apabila bersinggungan dengan *lived space* (Sudaryono, 2008). Produksi ruang lahir dari terciptanya embrio-embrio ruang sosial yang dibentuk melalui proses secara berkala sehingga ruang tidak pernah netral, ruang selalu berada dalam proses produksi. Dengan

demikian ruang tidak pernah berhenti memproduksi, ia selalu meninggalkan residu sebagai bahan untuk mereproduksi dirinya sendiri (Setiawan, 2017).

Menurut Lefebvre, ruang sebagai cara kapitalisme bekerja. Pemikiran ini dipengaruhi oleh pemikiran Marx tentang buruh dalam proses produksi. Marx melihat bahwa kapitalisme menekankan eksploitasi terhadap buruh dimana buruh sebagai entitas mutlak (manusia) teralienasi menjadi entitas abstrak yang keberadaannya dihitung berdasarkan satuan waktu kerja untuk menghasilkan komoditas. Dengan demikian buruh telah terabstraksi dalam sebuah komoditas. Begitupula dalam konteks produksi ruang, Lefebvre mengemukakan bahwa ruang sebagai sesuatu yang konkret mengalami sublimasi menjadi sesuatu yang abstrak dalam sistem kapitalisme. Melalui kekuatan modalnya, sistem kapitalisme menentukan rancangan dan peruntukan ruang baru sesuai keinginannya.

Sebagaimana yang dapat diamati pada ruang perkotaan, dimana ruang kota dirancang sedemikian rupa sesuai kepentingan kekuatan modal sehingga ruang tidak lagi dipandang sebagai ruang yang menghadirkan realitas sehari-hari para penghuninya, melainkan sebatas gambaran ideal yang dirancang sesuai kepentingan pemilik modal (Setiawan, 2017). Pemikiran masyarakat kota dibentuk mengikuti pemikiran kapitalis yang dituangkan melalui simbol-simbol. Hal ini tampak dalam fenomena industrialisasi yang dijadikan sebagai tolak ukur kehidupan yang *civilized*. Industrialisasi yang dicirikan dengan pembangunan gedung-gedung tinggi menghegemoni pemikiran masyarakat tentang makna keberhasilan. Dengan demikian, produksi ruang merupakan media untuk mengkampanyekan gaya hidup ideal yang direncanakan pemilik modal untuk dijalankan warga kota sebagaimana seharusnya.

Hal ini menunjukkan bahwa ruang yang teralienasi (terasing) menjadi sesuatu yang abstrak merupakan hasil dari serangkaian praktik ekonomi, politik, teknologi, dan budaya yang kemudian mengalami pergeseran pada level emosi dan personal. Ruang abstrak merupakan ruang yang telah mengalami politisasi dan birokratisasi sehingga ruang ini selalu memproduksi dan mendorong

homogenitas sosial (Tanra, 2019). Tentunya ruang ini dibentuk oleh kelas-kelas dominan yang dalam konteks masyarakat kota adalah para pemilik modal. Bagi Lefebvre, pihak yang dominan mampu mendominasi pihak yang memiliki kekuasaan lebih rendah melalui ruang sosial, baik dalam pemikiran maupun komoditas (Billahi, n.d.). Lefebvre menyebut kelas dominan ini sebagai totalitas semu.

Pemikiran Lefebvre tentang totalitas semu kemudian diadopsi oleh Williams. Dalam konteks ini, Williams menempatkan pemahaman totalitas Lefebvre kedalam aspek politik, yaitu hegemoni. Ia berargumen bahwa di satu sisi, kelas dominan memiliki kesempatan untuk menghegemoni atau menguasai unsur-unsur partikular yang berada dibawah konsep totalitas. Namun di sisi lain, unsur-unsur partikular tersebut dapat memberikan perlawanan dengan membentuk unsur totalitas tersendiri yang berasal dari lapisan-lapisan yang dibentuknya (Billahi, n.d.). Pertentangan-pertentangan semacam inilah yang menjadi kontradiksi antara kelas dominan dan unsur partikular dalam suatu ruang.

Dalam konsep hegemoni, setiap kelompok yang berada dalam suatu lapisan totalitas memiliki keinginan untuk menghomogenisasikan kultur mereka kedalam suatu konsep ruang. Oleh karena itu, masyarakat atau kelas-kelas dominan merupakan bagian dari totalitas tersebut, sedangkan kelompok oposisi merupakan bagian dari partikularitas. Hal inilah yang disebut sebagai proses politik dalam kehidupan sehari-hari (*everyday politics*) (Billahi, n.d.).

Praktik *everyday politics* ini dapat diamati dalam ruang lingkup perkotaan. Kehidupan kota yang identik dengan industrialisasi dan kapitalisme secara tidak langsung membentuk watak konsumerisme diantara warga kota. Namun watak konsumerisme ini tidak hanya berlaku bagi kelas-kelas atas dan menengah, melainkan juga menjangkau kelompok yang dianggap marjinal dan subordinat. Fiske (Dalam Minanto, 2018) mengemukakan bahwa produktivitas konsumsi tidak dibatasi oleh perbedaan kelas sosial. Kelompok-kelompok marjinal yang pada dasarnya merupakan masyarakat dengan kelas ekonomi kebawah masih

berpretensi untuk menyalurkan hasrat konsumerismenya melalui mekanisme politik keseharian (*everyday politics*).

Michel de Certeau (1984) menyebut mekanisme ini sebagai bentuk perlawanan populer yang dilakukan melalui serangkaian adaptasi atau dalam kadar tertentu dimaknai sebagai “tipu daya” atau “pengecoh”. Lefebvre melalui tulisannya tentang “*Everyday Life in the Modern World*” menjelaskan bahwa politik keseharian merupakan bentuk pertahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai himpitan kebutuhan hidup sekaligus tuntutan memenuhi kesenangan. Oleh karena itu, bagi Highmore, politik keseharian merupakan aktivitas yang penuh misteri, “*The everyday is also the home of the bizzare and mysterious. The commonplace of existence are filled with strange occurrences.*” (Minanto, 2018).

Praktik politik keseharian (*everyday politics*) juga merupakan salah satu bentuk respon atas ketidakselarasan antara ruang yang dikonseptualisasikan para perancang kota (*conceived space*) dengan ruang yang dirasakan para penggunanya (*perceived space*). Keadaan ini memungkinkan para pengguna ruang membentuk ruang baru yang sesuai dengan praktek kehidupan sehari-harinya (*lived space*) sehingga bukan tidak mungkin memicu lahirnya konflik-konflik spasial (Wuryanto, 2016). Konflik-konflik spasial ini muncul karena aktor yang terlibat dalam suatu ruang saling berkontestasi untuk mempertahankan ruang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan mereka. Michel de Certeau menjelaskan kondisi ini melalui konsep *spatial practices* (praktek meruang) yang meliputi *strategies* dan *tactic*.

Istilah *strategies* yang diperkenalkan de Certeau dapat dikatakan hampir mirip dengan *representation of space* yang dikemukakan Lefebvre. Dimana *strategies* mengacu pada bagaimana ruang “seharusnya” diwujudkan oleh para penggunanya. Dalam konteks ini, ruang dipahami oleh para pemegang kuasa sebagai sesuatu yang tetap serta tidak bergantung pada konteks dan waktu. Pemahaman ini seakan menjadi tradisi bersama yang berlangsung terus menerus dan dipertahankan melalui aturan-aturan yang bersifat mengikat (de Certeau,

1984). Dengan demikian, *strategies* merupakan produksi pengetahuan yang ditentukan dan dipertahankan oleh para penguasa (pihak yang dominan). Biasanya produksi pengetahuan ini tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi.

Selain itu, terdapat istilah *tactic* yang lebih mirip dengan *space of representation*. *Tactic* merupakan bentuk ‘ketidaksesuaian’ dalam hal keberadaan dikarenakan tidak ada ruang yang tersisa sesuai dengan kebutuhannya sehingga ruang dari *tactic* adalah ruang yang lain (de Certeau, 1984). *Tactic* selalu memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Oleh karena tindakan ini sering berada pada ruang yang lain, maka harus dilakukan penuh perhitungan sehingga munculah sifat oportunistis, siaga, serta memanfaatkan berbagai elemen yang ada untuk mempertahankan kepentingannya (de Certeau, 1984). Namun biasanya *tactic* yang dilakukan bukan bertujuan untuk mengambil alih, melainkan hanya untuk menegaskan eksistensi pelakunya serta memperoleh keuntungan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, dalam mekanisme politik keseharian terdapat strategi dan taktik yang dilakukan para aktor yang terlibat dalam suatu ruang untuk mempertahankan ruang sesuai kebutuhan mereka. Melalui mekanisme politik keseharian ini pula akan tercipta negosiasi-negosiasi sebagai upaya untuk mencapai apropriasi ruang, dimana tercapai *equilibrium* diantara konsepsi ruang yang bersifat abstrak dengan persepsi atas ruang yang tersedia berdasarkan pengalaman sehari-hari penghuninya.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tentang fenomena perebutan ruang secara simbolik yang terjadi di atas ruang Pasar TP Pagi. Fenomena ini muncul karena terjadi benturan makna atas ruang diantara para pelaku ruang sehingga mempengaruhi persepsi mereka mengenai bagaimana ruang seharusnya diwujudkan. Hal inilah yang mendorong pihak-pihak yang berkepentingan atas ruang selalu berusaha mencari cara untuk mendominasi pemanfaatan ruang dan memproduksi berbagai pengetahuan untuk mempertahankan hegemoni mereka

dalam suatu ruang melalui serangkaian strategi dan siasat.. Oleh karena pengkajian fenomena ini membutuhkan pemahaman dari pengalaman-pengalaman berbagai pihak yang terlibat, maka penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.

Menurut R. Bogdan dan S.J. Taylor (Dalam Riawanti, 2015), metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang difokuskan untuk mengkaji sesuatu yang tidak dapat diukur untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang dituliskan atau diucapkan sendiri oleh orang yang diteliti serta tingkah laku mereka yang teramati. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan latar belakang serta perilaku orang-orang tersebut secara holistik. Dalam artian, subyek penelitian tidak direduksi menjadi suatu variabel yang terisolasi, melainkan dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh.

Merujuk pada pendapat J.A. Maxwell (Dalam Riawanti, 2015), terdapat lima tujuan penelitian yang cocok diterapkan pada penelitian kualitatif, yaitu : (1) pemahaman makna pelaku sosial (partisipan) mengenai peristiwa atau situasi yang melibatkan pengalaman mereka, (2) pemahaman pada konteks khusus yang berkaitan dengan tindakan para pelaku serta pengaruh konteks ini terhadap perilaku mereka, (3) mengeksplorasi gejala suatu fenomena serta menghasilkan teori baru tentang gejala tersebut, (4) memahami proses berlangsungnya gejala, (5) membangun penjelasan (teori) tentang gejala. Oleh karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam pengetahuan dan pengalaman subyek penelitian terkait fenomena perebutan ruang di Pasar TP Pagi, maka data dalam penelitian ini tidak dapat diukur sehingga penelitian ini bersifat kualitatif.

Pemahaman secara mendalam atas fenomena ini dapat dilakukan melalui pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan pendekatan yang difokuskan untuk mencari “esensi” makna dari suatu fenomena yang dialami individu. “Esensi” yang dimaksud adalah pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka yang terkait dengan fenomena

(Creswell, 2013). Dengan kata lain, fenomenologi difokuskan untuk mendeskripsikan pemaknaan yang sama/umum dari semua partisipan yang terlibat dalam sebuah fenomena. Oleh karena itu, penelitian dengan pendekatan fenomenologi bertujuan untuk mereduksi pengalaman individu-individu yang terlibat dalam suatu fenomena menjadi deskripsi tentang esensi makna atau pemahaman yang bersifat khas dari sesuatu (Creswell, 2013). Menurut Moustakes (Dalam Creswell, 2013), deskripsi ini berupa “apa” yang mereka alami dan “bagaimana” mereka mengalaminya.

Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi berusaha mendeskripsikan pengalaman-pengalaman berbagai pihak yang terlibat dalam fenomena perebutan ruang secara simbolik di Pasar TP Pagi. Individu-individu yang terlibat dalam fenomena tersebut memiliki pemahaman dan pengalaman yang berbeda dalam memaknai sebuah ruang. Berbagai persepsi dan pengalaman inilah yang berusaha dicari “esensi” maknanya untuk kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dengan melibatkan “apa” yang dialami dan “bagaimana” mereka mengalaminya.

Tahap awal penelitian ini dimulai dengan menyusun gambaran umum terkait permasalahan yang akan dijadikan fokus penelitian. Gambaran umum ini diperoleh dengan membaca berbagai artikel ilmiah, penelitian terdahulu, buku, dan sumber-sumber berita yang tersebar di internet. Gambaran umum ini merupakan pedoman awal yang dimiliki peneliti sebelum terjun ke lapangan, sehingga ketika proses pengumpulan data berlangsung, peneliti tidak memulainya dengan “kepala kosong”. Gambaran umum yang ditentukan peneliti diawal semakin berkembang seiring dengan adanya temuan-temuan menarik di lapangan sehingga fokus penelitian semakin menyempit. Hal ini sejalan dengan sifat penelitian kualitatif yang fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian kualitatif lebih bersifat fleksibel dan cenderung diiringi spontanitas yang luar biasa antara peneliti dengan informan (Helaluddin, 2018). Fleksibilitas ini dapat dilihat melalui penggunaan

pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan merespons secara bebas sesuai pandangan dan perasaan mereka. Dalam artian, jawaban informan tidak terbatas pada “ya” atau “tidak”. Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang berperan penting dalam menginterpretasi fenomena berdasarkan sudut pandang informan yang diteliti. Dengan demikian, data yang semula terutama bersifat “emik”, yakni dari segi pandangan informan, dapat bersifat “etik” karena adanya interpretasi dari peneliti.

Untuk menghindari adanya bias dan unsur-unsur subjektif, informasi yang didapat di-check kebenarannya dan dibandingkan dengan sumber data yang lain. Proses ini disebut dengan *triangulasi data*. Secara umum, triangulasi data adalah suatu teknik pengecekan data yang dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber data (Bachtar, 2010). Terdapat berbagai macam triangulasi, diantaranya ; (1) triangulasi sumber data, (2) triangulasi teori, (3) triangulasi peneliti, (4) triangulasi metode. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode untuk mengecek kebenaran data. Melalui triangulasi metode, peneliti melakukan pengecekan data melalui beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi, dan FGD (*focus grup discussion*) untuk mendapatkan data yang sama. Selain itu peneliti juga menggunakan triangulasi sumber data, dimana data dari satu sumber (subyek penelitian) dibandingkan dengan sumber lain dalam pihak yang sama untuk diperoleh pemahaman dan pemaknaan yang bersifat umum atau khas. Melalui proses triangulasi ini, data yang didapatkan akan bersifat lebih obyektif.

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi pengambilan data dalam penelitian ini berada di Pasar TP Pagi. Pasar TP Pagi merupakan pasar yang terletak di sekitar jalan protokol kawasan wisata Tugu Pahlawan, tepatnya di trotoar sepanjang jalan Jalan Pahlawan, Jalan Kebon Rojo, Jalan Sulung, Jalan Semut Madya Indah, dan Jalan Bubutan. Pasar ini termasuk salah satu pasar besar di Kota Surabaya yang ramai dikunjungi masyarakat saat akhir pekan. Menurut berbagai literatur, pasar ini sudah ada sejak

krisis moneter melanda dan semakin berkembang di tahun 2000-an awal. Hingga saat ini, eksistensi Pasar TP Pagi tidak pernah pudar di kalangan masyarakat Surabaya hingga luar daerah.

Terdapat beberapa pertimbangan yang membuat peneliti tertarik menjadikan pasar ini sebagai lokasi pengambilan data dibandingkan pasar lainnya, diantaranya yaitu; **Pertama**, letak lokasinya yang cukup unik, yaitu berada di salah satu ruas jalan protokol Surabaya. Sepanjang pengetahuan penulis, pasar-pasar besar di Surabaya biasanya berlokasi di perkampungan atau di bahu jalan raya yang tidak terlalu besar. Namun Pasar TP Pagi justru berlokasi di tengah kota bahkan berdampingan dengan bangunan-bangunan formal seperti Kantor Pos Besar, Bank Indonesia, Bank Mandiri, Kantor Peln, Hotel Surabaya, hingga Kantor Gubernur Jawa Timur. Kehadiran sektor informal di tengah kawasan yang didominasi bangunan formal menjadikan pemandangan di kawasan ini terkesan kontras.

Kedua, meskipun lokasinya berdampingan dengan bangunan-bangunan formal, Pasar TP Pagi jarang sekali mengalami penertiban secara ekstrem, dalam artian digusur secara paksa, padahal di pasar-pasar lain yang memiliki kriteria serupa—umumnya bersifat ilegal, mengokupasi ruang publik lain, *semrawut*, dan dipenuhi pedagang kaki lima— seperti Pasar Gembong, Pasar Burung Kalimas, dan sebagainya seringkali diadakan operasi penertiban yang bersifat represif. Di Pasar TP Pagi, penertiban hanya berupa pembatasan pasar hingga jam operasional tertentu. Secara tidak langsung, pemerintah kota telah memberikan izin bagi pedagang kaki lima berdagang di sepanjang lokasi tersebut. Menurut peneliti, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana cara-cara pedagang kaki lima bertahan di Pasar TP Pagi, sekaligus pertimbangan-pertimbangan pemerintah kota tidak menggusur pedagang kaki lima di lokasi ini.

Ketiga, pasar ini selalu ramai dikunjungi masyarakat kota di setiap akhir pekan. Kriteria pengunjungnya pun beragam, mulai dari kalangan bawah hingga menengah keatas, mulai dari orangtua hingga anak-anak muda. Bagi peneliti,

fenomena ini tentu menarik karena biasanya target pasar tradisional ditujukan bagi kaum menengah kebawah, namun di Pasar TP Pagi tampaknya tidak demikian. Tipe konsumen Pasar TP Pagi pun sangat beragam, tidak hanya berasal dari penduduk lokal, namun juga mahasiswa, hingga turis lokal maupun mancanegara.

1.6.2 Teknik Penentuan Informan

Pada dasarnya faktor terpenting dalam memilih informan diharapkan dapat menggambarkan makna dari fenomena atau peristiwa secara detail. Penentuan informan dalam penelitian ini berpedoman pada pendapat yang dikemukakan Creswell (2013). Setidaknya terdapat beberapa kriteria informan yang baik dalam studi fenomenologi menurut Creswell, diantaranya yaitu : (1) informan biasanya terdapat dalam satu lokasi, (2) informan adalah orang yang mengalami secara langsung peristiwa yang menjadi bahan penelitian, (3) informan mampu menceritakan kembali peristiwa yang telah dialami itu, (4) memberikan kesediaannya secara tertulis untuk dijadikan informan penelitian, jika diperlukan.

Dalam studi ini, peneliti memilih informan yang berada dalam satu lokasi penelitian, yaitu Pasar TP Pagi. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam penguasaan ruang di area tersebut, diantaranya adalah pedagang kaki lima, Satpol PP (sebagai perwakilan pemerintah kota), dan pejalan kaki/pengunjung Pasar TP Pagi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Creswell bahwa kriteria informan yang baik adalah : “*all individuals studied represent people who have experienced the phenomenon*” (Creswell, 2013). Dengan kata lain, informan yang baik adalah seseorang yang benar-benar terlibat langsung terkait fenomena yang diteliti dalam jangka waktu yang lama. Jadi lebih tepat memilih informan yang kesehariannya terlibat interaksi dalam kegiatan di Pasar TP Pagi sehingga karena pengalamannya, ia mampu mengartikulasikan pengalaman dan pandangannya tentang sesuatu yang dipertanyakan.

Untuk mendapatkan informan yang bisa menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya sekaligus mengartikulasikan pandangannya, wawancara singkat

dilakukan kepada sebanyak mungkin pihak-pihak yang berinteraksi di Pasar TP Pagi untuk menentukan siapa yang akan menjadi subyek utama dan subyek pendukung. Subyek utama adalah informan yang dianggap sesuai dengan kriteria yang ditentukan peneliti dan akan di wawancara lebih lanjut (*in-depth interview*). Sedangkan subyek pendukung merupakan informan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan peneliti, namun memiliki informasi yang dapat mendukung analisis penelitian.

Pedagang kaki lima yang dipilih sebagai subyek utama dalam penelitian ini adalah pedagang yang tergabung dalam Paguyuban PKL 5 Pahlawan. Alasannya karena anggota-anggota paguyuban ini berjualan setiap hari di Pasar TP Pagi sehingga interaksi mereka—baik dengan sesama pedagang, aparat Satpol PP, maupun pengunjung—terjalin lebih intens, dibandingkan dengan pedagang liar yang hanya berdagang satu minggu sekali. Di lain pihak, Satpol PP yang dijadikan sebagai subyek utama adalah anggota Satpol PP yang bertugas menertibkan pedagang Pasar TP Pagi di setiap akhir pekan ataupun orang yang memiliki pengetahuan yang baik tentang Pasar TP Pagi. Sedangkan pejalan kaki atau pengunjung yang termasuk kriteria subyek utama adalah pengunjung yang sudah melakukan kegiatan konsumsi atau setidaknya mengunjungi Pasar TP Pagi minimal sebanyak 5x dalam 6 bulan terakhir. Jumlah ini dirasa cukup untuk menggambarkan bahwa pejalan kaki atau pengunjung memiliki kedekatan atau *sense of place* dengan ruang Pasar TP Pagi.

Setelah melakukan wawancara singkat kepada sebanyak mungkin pihak-pihak yang berinteraksi di Pasar TP Pagi, peneliti mendapatkan 7 informan yang dirasa sesuai dengan kriteria dan bersedia diwawancarai secara mendalam. Berikut ini merupakan nama-nama informan yang terpilih sebagai subyek utama penelitian :

1. Pak Choiron, seorang pedagang kaki lima yang menjual pakaian bekas di Pasar TP Pagi. Selain berdagang, ia juga merupakan salah satu pengurus paguyuban PKL 5 Pahlawan yang kesehariannya berperan sebagai

koordinator lapangan. Ia mengaku sudah 25 tahun berdagang di lokasi ini, dengan kata lain sudah hafal betul dengan dinamika yang menyertai kegiatan usahanya di lokasi ini. Dinamika yang dimaksud berkaitan dengan perubahan-perubahan kebijakan bagi pedagang kaki lima di Pasar TP Pagi, mulai dari masa kepemimpinan walikota Soenarto Soemoprawiro, Bambang D.H., Tri Rismaharini, hingga Eri Cahyadi. Perannya sebagai pengurus paguyuban membuatnya berpengalaman dalam menjalin negosiasi-negosiasi yang mewakili aspirasi kelompok pedagang kaki lima di hadapan pemerintah kota, atau dalam kata lain sebagai “juru bicara”. Oleh karena pengalaman dan pengetahuannya mengenai dinamika pedagang kaki lima cukup baik, peneliti menjadikannya sebagai informan kunci (*key informan*).

2. Pak Riyadi, seorang pedagang kaki lima yang menjual celana bekas di Pasar TP Pagi. Ia merupakan seorang anggota paguyuban PKL 5 Pahlawan yang sudah hampir 12 tahun berjualan di lokasi tersebut. Sebelum membuka lapak di Pasar TP Pagi, ia adalah pedagang kaki lima di Pasar Gembong. Adanya insiden penggusuran di Pasar Gembong membuatnya pindah ke Pasar TP Pagi. Ia mengaku bahwa kepindahannya ke tempat baru ini dibantu oleh Pak Choiron selaku pengurus paguyuban. Adanya peran Pak Choiron memudahkan aksesnya untuk mendapatkan lapak di Pasar TP Pagi. Oleh karena kedekatannya dengan Pak Choiron, Pak Riyadi ini menjadi gerbang pertama yang mengantarkan peneliti kepada Pak Choiron selaku informan kunci.
3. Abah Alun, seorang pedagang kaki lima yang sudah 18 tahun berjualan pakaian bekas di Pasar TP Pagi. Ia juga termasuk sebagai anggota paguyuban PKL 5 Pahlawan yang kesehariannya berjualan di Jalan Kebon Rojo, kecuali di hari minggu, ia berjualan di jalan Sulung. Sebagai pedagang *lawas*, ia tentu sudah paham dengan dinamika pedagang kaki lima Pasar TP Pagi. Keterangan dari Abah Alun sangat berguna untuk memperkaya data dalam penelitian ini.

4. Pak Mudita, seorang aparat Satpol PP yang menjabat sebagai Kepala Seksi Operasional. Dalam kesehariannya, ia bertugas dalam mengelola penertiban bagian Surabaya Utara secara administratif, terkadang juga ikut terjun dalam operasi harian di lapangan. Meskipun tidak terlalu sering terjun ke lapangan, Pak Mudita memiliki pengetahuan yang luas mengenai dinamika pedagang kaki lima di Surabaya secara normatif. Informasinya tentu sangat penting bagi kelengkapan data dalam penelitian ini, khususnya terkait informasi yang membutuhkan sudut pandang pemerintah kota. Oleh karena kemampuannya yang baik dalam mengartikulasikan pandangannya tentang pedagang kaki lima dari kacamata pemerintah kota, peneliti menjadikannya sebagai informan kunci (*key informan*).
5. Mas Reza, seorang mahasiswa yang hampir setiap minggu berbelanja pakaian bekas di Pasar TP Pagi. Ia juga mempunyai relasi dengan beberapa pedagang pakaian bekas, baik di dalam maupun diluar Pasar TP Pagi. Oleh karena sering berbelanja di lokasi ini, ia sudah paham betul dengan situasi TP Pagi. Pengalaman dan pengetahuannya yang baik tentang Pasar TP Pagi membuat peneliti tertarik menjadikannya sebagai informan kunci yang mewakili pihak pengunjung/ pejalan kaki. Mas Reza ini pula yang mengantarkan peneliti berkenalan dengan beberapa informan pedagang kaki lima diatas.
6. Ifan, seorang mahasiswa yang termasuk sering berbelanja pakaian di Pasar TP Pagi. Peneliti mengenalnya melalui media sosial. Saat itu peneliti sedang melakukan survey singkat melalui *instagram stories* tentang persepsi publik terhadap Tugu Pahlawan. Kemudian informan ini menanggapi *instagram stories* dan mengatakan bahwa kegiatan yang sering dilakukannya saat berkunjung ke Tugu Pahlawan adalah berbelanja. Hal ini membuat peneliti tertarik menjadikannya informan.
7. Dika, seorang mahasiswa yang sudah beberapa kali berbelanja di Pasar TP Pagi. Peneliti mengenalnya melalui relasi peneliti. Informasinya sangat membantu melengkapi data dalam penelitian ini.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Berikut ini secara rinci akan disajikan tentang cara peneliti dalam mengumpulkan data :

1.6.3.1 Observasi

Pengumpulan data paling awal dalam penelitian ini didapat melalui pengamatan (observasi). Menurut Werner & Schoepfle (Dalam Hasanah, 2017), observasi merupakan proses pengamatan sistematis yang dilakukan peneliti terhadap aktivitas alami manusia yang diamati dan berlangsung secara kontinu untuk menghasilkan data yang obyektif. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang tidak bisa diperoleh melalui wawancara, misalnya untuk melihat perilaku nonverbal, gaya bicara, dan gaya berpakaian dari seorang informan yang sedang diteliti (Nasution, 1988). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dalam kurun waktu 6 bulan, mulai bulan desember hingga mei, pada hari senin sampai minggu, namun tidak dilaksanakan setiap hari secara berturut-turut. Pelaksanaan observasi dimulai sejak pasar dibuka hingga pasar ditutup, yaitu pukul 05.30-10.00 saat hari biasa dan pukul 05.30-09.00 saat hari minggu.

Sebelum terjun ke lapangan, peneliti menentukan hal apa saja yang akan diamati. Hasil pengamatan inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai data penelitian. Beberapa kegiatan pengamatan awal difokuskan untuk melihat pola kegiatan yang berlangsung di Pasar TP Pagi mulai pasar tersebut dibuka hingga ditertibkan oleh aparat Satpol PP. Pengamatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum lingkungan fisik Pasar TP Pagi.

Dalam sebuah penelitian, pengamatan tidak hanya dilakukan pada sebatas lingkungan fisiknya saja, melainkan juga lingkungan kebudayaannya, agar dapat dipahami latar belakang perasaan dan pikiran orang yang dijadikan sumber informasi (Nasution, 1988). Oleh karena itu, beberapa kegiatan observasi selanjutnya difokuskan untuk mengamati hubungan antara aktor-aktor yang

berinteraksi di ruang Pasar TP Pagi. Seperti misalnya hubungan antar pedagang dengan pedagang, antara pedagang dengan Satpol PP, maupun antara pedagang dengan pengunjung. Pengamatan terhadap hubungan antar aktor ini bertujuan untuk memetakan aktor yang “ditokohkan” sekaligus menentukan informan.

Observasi dalam penelitian ini termasuk sebagai observasi partisipan. Peneliti melakukan observasi secara partisipatif untuk melihat lebih dekat aktivitas para aktor yang terlibat interaksi di ruang Pasar TP Pagi agar data yang dihasilkan lebih banyak, mendalam, dan terperinci. Dalam beberapa pengamatan awal, peneliti bertindak sebagai penonton dalam mengamati situasi sosial di Pasar TP Pagi. Peneliti sengaja memilih tempat yang strategis agar tidak terlalu mendapat perhatian sekaligus mendapatkan “*natural setting*”. Terkadang pula peneliti melakukan pengamatan sambil menyusuri seluruh area Pasar TP Pagi (mulai dari jalan Semut Madya Indah hingga jalan Pahlawan).

Dalam beberapa pengamatan awal, peneliti hanya sekedar mengamati, mencatat, dan mendokumentasikan situasi sosial di Pasar TP Pagi. Kemudian secara berangsur-angsur, peneliti turut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan para pelaku ruang sosial. Seperti misalnya memasuki lapak pedagang satu-persatu dan bersikap seolah-olah peneliti adalah pelanggan biasa yang hendak melihat-lihat barang dagangan pedagang. Kadangkala dalam beberapa kesempatan, peneliti *nongkrong* di sekitar Indomaret PELNI—yang merupakan titik kumpul Satpol PP sebelum penertiban—untuk mengamati dan berinteraksi dengan Satpol PP yang akan melakukan penertiban. Interaksi yang dilakukan peneliti selama proses observasi bertujuan untuk memetakan dan menemukan seseorang yang dipandang memenuhi kriteria untuk dijadikan informan, baik dari pihak pedagang kaki lima, aparat Satpol PP, maupun pelanggan atau pejalan kaki.

Dalam konteks ini, peneliti melakukan observasi partisipan dengan tingkat partisipasi sedang. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Nasution (1988), bahwa tingkat partisipasi peneliti dalam sebuah observasi terdiri atas partisipasi nihil, partisipasi pasif, sedang, aktif, sampai partisipasi penuh. Dalam partisipasi

sedang, terdapat keseimbangan diantara kedudukan peneliti sebagai orang dalam dan sebagai orang luar. Biasanya pengamatan ini diawali dengan peneliti bertindak sebagai orang luar, sebagai penonton dan kemudian berangsur-angsur turut serta dalam situasi atau kegiatan. Melalui observasi partisipan dengan tingkat sedang, peneliti memposisikan diri secara seimbang antara peranan berpartisipasi dengan peranan sebagai pengamat, dalam artian tidak mengikuti semua aktivitas yang dilakukan pelaku sosial yang diteliti secara penuh. Hal ini bertujuan agar data yang dikumpulkan lebih obyektif.

Hambatan-hambatan yang seringkali peneliti temui selama proses observasi adalah sikap pedagang yang minim informasi serta menampilkan *gesture* tidak nyaman saat peneliti mengajukan pertanyaan singkat yang tidak berkaitan dengan barang dagangannya. Peneliti berasumsi jika sikap beberapa pedagang tersebut dikarenakan 2 alasan : **Pertama**, pedagang sedang sibuk melayani pelanggan lain sehingga tidak sempat meladeni pertanyaan peneliti diluar barang dagangannya. Umumnya situasi ini terjadi saat hari minggu, dimana Pasar TP Pagi berada pada puncak keramaian. **Kedua**, kecurigaan pedagang terhadap peneliti, yang entah menganggap peneliti sebagai wartawan atau pihak yang hendak menggusur pedagang. Sehingga ia terkesan hati-hati apabila memberikan informasi. Sedangkan dari pihak Satpol PP, peneliti kesulitan melakukan pendekatan secara informal di Pasar TP Pagi karena keterbatasan waktu yang mereka punya. Hal ini membuat peneliti tidak bisa lama berinteraksi dengan anggota Satpol PP yang bertugas di Pasar TP Pagi.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, peneliti melakukan beberapa strategi agar proses observasi berjalan lancar. Seperti misalnya dengan mengajak salah satu rekan yang sudah terbiasa berbelanja di Pasar TP Pagi agar interaksi antara peneliti dan pedagang tidak terlalu canggung. Dalam hal ini, peneliti bersikap sebagai pelanggan yang seolah-olah sedang menemani rekannya berbelanja, sambil sesekali berinteraksi dan menyisipkan pertanyaan ringan sesuai informasi yang ingin didapat. Strategi ini ternyata cukup efektif untuk mendapatkan perhatian pedagang, meskipun tidak semua pedagang seketika

bersikap terbuka. Di sisi lain, peneliti juga beberapa kali berkesempatan berinteraksi dengan anggota Satpol PP yang sedang duduk-duduk sendirian di sekitar Indomaret PELNI. Dalam konteks ini, biasanya peneliti membuka obrolan dengan cara bertanya batas jam operasional Pasar TP Pagi maupun bertanya perihal alamat tertentu. Namun pendekatan semacam ini membutuhkan waktu yang lama agar bisa mendapatkan momen yang pas sehingga pembicaraan terkesan alamiah.

Selama proses observasi, peneliti mendokumentasikan aktivitas yang sedang diamati sekaligus mencatat situasi-situasi yang dirasa penting sebagai tambahan data menggunakan *handphone*. Penggunaan *handphone* bertujuan agar mereka yang menjadi sasaran pengamatan tidak menyadari apabila sedang diamati peneliti. Penggunaan buku catatan di tengah situasi pasar dikhawatirkan menghadirkan kesan mencolok sehingga pelaku sosial menyadari jika dirinya sedang diamati. Akibatnya, peneliti tidak bisa mendapatkan *natural setting*. Hasil observasi yang didapatkan peneliti kemudian digunakan sebagai tambahan data, sekaligus sebagai acuan dalam memilih informan yang dianggap memiliki karakter dan kriteria sesuai dengan topik yang diangkat.

1.6.3.2 Wawancara

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data utama dalam studi fenomenologis yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dalam sebuah penelitian sekaligus memahami pikiran dan perasaan informan yang diteliti. Melalui hasil observasi sebelumnya, peneliti telah mendapat gambaran aktor-aktor yang “ditokohkan” di Pasar TP Pagi. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan lebih lanjut kepada calon informan yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan peneliti sebelumnya. Diperlukan berbagai cara agar peneliti bisa mendapatkan akses kepada calon informan.

Sebelum melakukan wawancara, biasanya peneliti mengadakan pertemuan secara informal dengan calon informan melalui perantara seseorang yang berkenalan baik dengan informan. Pertemuan secara informal ini tidak langsung

digunakan untuk wawancara mendalam, melainkan hanya untuk menjalin *rapport*. Biasanya pertemuan informal ini dilakukan sebelum peneliti mewawancarai pedagang kaki lima dan pengunjung Pasar TP Pagi agar terjalin keakraban diantara kami. Sedangkan untuk melakukan wawancara dengan Satpol PP, peneliti menggunakan jalur perizinan formal, yaitu dengan mengajukan surat rekomendasi penelitian dari Bakesbangpol yang ditujukan kepada Satpol PP. Tanpa melalui mekanisme ini, permintaan wawancara tidak akan dilayani.

Selama proses wawancara, peneliti berusaha untuk menyesuaikan sikap dan penampilan sebagaimana lazimnya di tempat tersebut. Seperti misalnya ketika melakukan pendekatan wawancara dengan pedagang kaki lima dan pengunjung Pasar TP Pagi, peneliti menggunakan pakaian santai berupa kaos oblong dan sandal jepit. Sepanjang proses wawancara pun peneliti lebih banyak berbahasa *ngoko* dibandingkan berbahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghindari “jarak sosial” yang terlalu jauh antara peneliti dengan informan, meskipun tentu saja mereka tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kesan “orang asing” terhadap diri peneliti. Namun setidaknya dengan penyesuaian tersebut, suasana selama proses wawancara akan berlangsung tanpa kekakuan. Sedangkan untuk pendekatan dengan informan dari lembaga formal, peneliti bersikap lebih formal dan menggunakan pakaian yang sesuai dengan aturan mereka.

Wawancara dalam penelitian memang sedapat mungkin dilakukan dalam suasana santai dan tidak formal seperti halnya percakapan sehari-hari. Sebisanya mungkin peneliti berupaya agar pembicaraan dengan informan terkesan alamiah dan tidak terpaku pada sederet pertanyaan baku. Wawancara ini termasuk dalam kategori wawancara tidak berstruktur. Secara umum, wawancara tidak terstruktur merupakan tipe wawancara yang sifatnya bebas, di mana peneliti tidak terlalu fokus pada pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara biasanya hanya berupa garis-garis besar atau rambu-rambu permasalahan yang akan ditanyakan (Rifki, 2017). Wawancara tidak terstruktur dilakukan untuk menciptakan suasana menjadi lebih dialogis, terbuka, bebas, serta terhindar dari kekakuan. Sehingga akan didapatkan

informasi tentang aspek-aspek yang tidak tampak di permukaan seperti misalnya tentang ketidakpercayaan pedagang kaki lima terhadap pemerintah kota.

Proses wawancara untuk satu informan tidak hanya satu kali, melainkan ada beberapa informan yang diwawancara hingga 2-3 kali pertemuan. Umumnya wawancara berlangsung selama 1-1,5 jam dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal informan. Seperti ketika mewawancarai pedagang misalnya, biasanya wawancara dilakukan setelah informan selesai melakukan aktivitas berdagang di pasar TP Pagi. Terkadang apabila memungkinkan, wawancara dilakukan selama kegiatan berdagang, khususnya saat hari biasa (selain hari sabtu dan minggu) atau ketika kondisi dagangannya sedang sepi. Demikian pula saat mewawancarai Satpol PP, peneliti harus menghubungi bagian *front office* terlebih dahulu agar wawancara bisa dijadwalkan sesuai ketersediaan informan. Sedangkan untuk mewawancarai pengunjung pasar TP Pagi, peneliti melakukan pertemuan diluar kegiatannya berbelanja. Seperti misalnya nongkrong di *café*. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan *handphone* sebagai alat perekam.

Selama proses pengumpulan data wawancara, terdapat beberapa kendala yang dialami peneliti. Peneliti sempat kesulitan mengatur jadwal wawancara dengan informan, terutama dengan pedagang kaki lima. Kadangkala terdapat pedagang yang kerap kali membatalkan jadwal wawancara yang telah disepakati bersama karena alasan-alasan tertentu. Kendala ini akhirnya dapat teratasi ketika peneliti melakukan pendekatan-pendekatan khusus seperti memberi bingkisan-bingkisan dan souvenir kepada pedagang kaki lima. Selain itu, beberapa jam sebelum wawancara dimulai, biasanya peneliti menyempatkan diri untuk mampir ke lapak pedagang, entah untuk membeli atau sekedar melihat-lihat dagangan para pedagang. Dengan pendekatan ini, agaknya peneliti berhasil mengambil hati informan.

Kendala lain juga dialami peneliti saat melakukan wawancara dengan Satpol PP. Pada awalnya, peneliti bermaksud mengadakan pertemuan informal dengan anggota Satpol PP yang bertugas di Pasar TP Pagi melalui relasi peneliti

yang berkenalan baik dengan calon informan. Namun undangan ini tidak kunjung direspons oleh calon informan sehingga peneliti melakukan wawancara melalui jalur perizinan formal. Apabila melalui jalur perizinan formal, peneliti tidak dapat menentukan sendiri informan yang hendak diwawancara, melainkan direkomendasikan oleh petugas administrasi. Biasanya informan yang direkomendasikan pihak administrasi adalah seseorang yang memiliki kapabilitas terhadap fenomena yang diteliti, itupun masih harus disesuaikan dengan ketersediaan informan.

Bersamaan dengan itu, peneliti masih berusaha untuk menjalin relasi secara informal dengan anggota Satpol PP, salah satunya melalui interaksi dengan aparat yang bertugas di Pasar TP Pagi. Namun interaksi yang berlangsung tidak dapat berlangsung lama karena mereka harus bertugas. Oleh karena itu mereka merekomendasikan nama-nama koordinator lapangan yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai apa yang diteliti. Namun ketika peneliti menemui seseorang yang dimaksud di Kantor Satpol PP, koordinator lapangan ini tidak bersedia diwawancara, baik secara formal maupun informal karena ia tidak mendapat komando dari atasan yang lebih berwenang. Sebagaimana sistem militer, petugas Satpol PP tidak akan menjalankan tugas tanpa perintah atasan.

Kesulitan ini akhirnya sedikit menemukan titik terang disaat peneliti melakukan pertemuan kedua dengan informan yang sudah peneliti wawancara sebelumnya. Pada pertemuan tersebut, peneliti diperbolehkan untuk melakukan wawancara dalam bentuk FGD (*focus group discussion*). Dimana FGD ini dihadiri oleh tiga orang, yaitu ; peneliti, Kepala Seksi Operasional, dan petugas administrasi yang pernah beberapa kali patroli di Pasar TP Pagi dan sering berinteraksi dengan pengurus paguyuban di kantor. Menurut peneliti, informasi yang didapatkan saat FGD ini cukup untuk melengkapi data dari sudut pandang pemerintah kota.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari “esensi” dari pengetahuan dan pengalaman-pengalaman individu agar dapat menjadi pandangan yang bersifat kolektif. Dengan kata lain, esensi sebuah fenomena dapat diperoleh apabila terjadi pemahaman yang khas dari individu-individu dalam memandang sesuatu. Oleh karena itu, studi ini bermaksud untuk mengungkap “esensi” dari pengetahuan dan pengalaman individu yang menggunakan ruang di Pasar TP Pagi, sehingga kemudian melahirkan sejumlah perilaku politis sebagai upaya mempertahankan ruang sesuai kepentingannya masing-masing. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan “esensi” dari fenomena perebutan ruang secara simbolik di Pasar TP Pagi adalah 6 bulan, terhitung mulai bulan desember hingga mei 2022.

Untuk mendapatkan esensi sebuah fenomena, sebisa mungkin peneliti harus mengesampingkan pengalaman sebelumnya agar dapat memahami pengalaman partisipan secara utuh. Pemahaman ini dapat diperoleh melalui wawancara mendalam yang dituliskan dalam bentuk transkrip wawancara. Percakapan-percakapan dalam transkrip ini adalah data utama yang dianalisis dalam penelitian ini sehingga dapat dipahami esensi atau pemahaman dasar tentang fenomena tersebut. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan analisis taksonomi dengan cara mengklasifikasikan atau menggolongkan data wawancara berdasarkan pertanyaan penelitian. Seperti misalnya, peneliti menggolongkan data yang memuat gagasan, persepsi, dan pengalaman tiap partisipan yang terlibat dalam aktivitas di Pasar TP Pagi sebagai produksi ruang sosial di Pasar TP Pagi. Kemudian informasi yang memuat ketidaksepahaman persepsi, konflik, dan perlawanan secara simbolik kedalam pembahasan kontestasi penguasaan ruang. Adapula informasi yang mencakup strategi, siasat, dan kompromi sebagai bentuk politik keseharian di Pasar TP Pagi.

Data-data yang diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut kemudian disajikan dalam bentuk kolom-kolom analisis (*matriks*) untuk

mempermudah peneliti membangun deskripsi dan menarik kesimpulan. Penyajian data dalam bentuk kolom-kolom analisis ini harus disajikan secara singkat melalui kata kunci disertai kutipan langsung. Seperti misalnya, untuk tema produksi ruang sosial, peneliti menggunakan kode ReR (representasi ruang), RuR (ruang representasi), dan PS (praktik spasial) sebagai komponen utama di kolom 1. Kolom 2 baris 1 mencakup kata kunci dalam data wawancara yang memuat kode ReR yaitu trotoar untuk pejalan kaki, pasar semrawut, tidak sesuai tata ruang kota, PKL tidak mematuhi perda, dan sebagainya. Sedangkan kolom 3 adalah kolom kutipan langsung yang isinya disesuaikan dengan kolom sebelumnya. Begitu seterusnya. Melalui kolom-kolom analisis ini, peneliti dapat melihat pola-pola yang sama dari data wawancara yang diperoleh. Kolom-kolom analisis ini nantinya akan dijadikan sebagai pedoman analisis data dan akan peneliti cantumkan pada bagian lampiran.

Untuk menghasilkan analisis yang berkualitas, data yang telah terpola ini akan di-*check* kembali dengan data observasi yang masih sesuai dengan konteks data wawancara yang dianalisis. Seperti misalnya data wawancara yang menyebutkan adanya gratifikasi yang diberikan pedagang kaki lima terhadap aparat Satpol PP diperkuat kembali dengan data observasi peneliti saat melakukan wawancara di kantor Satpol PP. Data observasi tersebut berupa kode-kode dan *guyonan* antarsesama anggota yang kurang lebih menyiratkan bahwa PKL paguyuban lebih bisa diajak bekerjasama dibandingkan PKL liar karena dari PKL paguyuban ada hasil yang bisa “dicicipi”. Dalam konteks ini, data observasi digunakan sebagai pendukung data wawancara.

Data wawancara yang telah dicocokkan dengan data observasi ini kemudian dijabarkan dan ditarik kesimpulan. Namun kesimpulan yang dimaksud bukanlah kesimpulan akhir penelitian, melainkan lebih kepada “makna” atau interpretasi data yang telah dipilah dan disajikan. Hasil analisis data pada penelitian ini mengkombinasikan antara data *emic* dan *etic*. Dalam penelitian ini, data *emic* berupa pernyataan-pernyataan yang menggambarkan perasaan dan pengalaman partisipan dalam memaknai ruang sosial Pasar TP Pagi, yang

dituangkan secara jernih dalam bentuk percakapan-percakapan atau kutipan langsung. Sedangkan data *etic* adalah pengalaman dan persepsi partisipan yang telah diinterpretasi peneliti untuk mendapatkan esensi dari sebuah fenomena. Data yang telah dianalisis ini juga divalidasi lagi dengan data-data pustaka.